



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Raya Cijulang No.248 Cijulang Kabupaten Pangandaran 46394,
Telepon, (0265)2640011, Faks, (0265)2640011
Surel : bkadpangandaran.kab@gmail.com; Website :
<https://bkad.pangandarankab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 telah selesai disusun. Laporan Keuangan ini disusun dalam rangka memenuhi peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan Negara/ Daerah khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2024 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Demikian kami sampaikan, semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran.

Cijulang, 20 Mei 2025

Pt. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Pangandaran



PADI KURNIADI, SIP.,MM



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Raya Cijulang No.248 Cijulang Kabupaten Pangandaran 46394,
Telepon, (0265)2640011, Faks, (0265)2640011
Surel : bkadpangandaran.kab@gmail.com; Website :
<https://bkad.pangandarankab.go.id/>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

**KEPALA OPD
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Laporan Keuangan 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran yang terdiri dari : (a) Neraca, (b) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (c) Laporan Operasional (LO); (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024, sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan Tahun 2024 tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Cijulang, 20 Mei 2025

Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pangandaran



IDI KURNIADI, SIP.,MM



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik sudah merupakan suatu tuntutan bagi segenap komponen pemerintah, menjadikan Laporan Keuangan sebagai alat informasi untuk mengoptimalkan pelayanan kepada publik.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan berupaya menyusun Laporan Keuangan sebagai optimalisasi informasi program dan kegiatan dalam mendukung Pemerintahan Kabupaten Pangandaran.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan dimaksud disusun sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah. Adapun maksud/tujuan dari Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran selama satu tahun pelaporan.
- b. Menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan, baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
- c. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- d. Menyajikan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi ,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- l. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 46.A Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- m. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta

- Tata Kerja Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 104 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 55 Tahun 2024 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 104 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan keuangan SKPD

Sistematika penyajian Laporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

BAB 1	Pendahuluan
	1.1. Maksud dan Tujuan penyusunan laporan keuangan
	1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
	1.3. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan
BAB II	Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja
	2.1 Kebijakan keuangan
	2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah
	3.2 Realisasi dan Rencana Kerja keuangan program dan kegiatan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
BAB V	Penjelasan Pos Pos Laporan Keuangan
	5.1 Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja
	5.2 Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional

5.3	Penjelasan atas Pos Pos Neraca
5.4	Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI	Penjelasan Atas Informasi Informasi Non Keuangan
BAB VII	Penutup



BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran yang mendukung pada Visi Misi Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026.

Visi Kabupaten Pangandaran dengan penjelasan sebagai berikut :

“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”.

Dalam mewujudkan Visi tersebut dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan melalui Misi. Adapun yang menjadi misi Bupati Kabupaten Pangandaran Periode 2021-2026 adalah:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani;
- 2) Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
- 3) Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas;
- 4) Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan local;
- 5) Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing;
- 6) Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan;

Dalam Visi, dan Misi tersebut diatas terdapat Visi dan Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu dalam point Membantu Bupati untuk mencapai tatakelola yang efektif, akuntabel dan transparan, melalui peningkatan pengelolaan keuangan (*Good Government*).

Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan yang tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 dijelaskan keuangannya mencakup unsur Belanja yang terdiri dari:

- 1. Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja pegawai
- 2. Belanja Langsung, yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Belanja tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2024.

2.2. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi belanja adalah berdasarkan urusan Pemerintah yang terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Adapun Badan Keuangan dan Aset Daerah termasuk dalam urusan wajib pemerintahan umum.

TABEL 2.1
INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi
	2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik
	3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur
	4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu
	2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu
	3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan
	Persentase kesesuaian dokumen penganggaran sesuai waktu dan ketentuan
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase PD yang mengirimkan RKA dan DPA
	Persentase Raperda Raperbub APBD sesuai ketentuan

	Persentase skpd yang melaksanakan monitering dan evaluasi penyusunan anggaran
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase PD yang melaksanakan penyerapan belanja yang tertib dan sesuai ketentuan
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Peresentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP(Akrual)
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyerapan anggaran belanja sesuai aturan
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD yang tertib dan akuntabel oleh Perangkat Daerah
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terinventarisir

	Presentase PD yang melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sesuai standar
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan

Program Belanja Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 234.007.155.038,- terealisasi sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 217.773.076.955,- atau sebesar 93,06% Hasil pelaksanaan program Belanja Daerah tersebut adalah meningkatnya kinerja Pegawai Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah. Struktur Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang berisi gambaran realisasi pencapaian

Efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tersebut diambil dari tabel pengukuran kinerja kegiatan dengan pengelompokan berdasar pada urusan wajib dan pilihan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas.

Adapun uraian kinerja program dan kegiatan disajikan dalam lampiran laporan keuangan ini sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Pangandaran yaitu Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan, sebagai beriku

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi s/d	Sisa Anggaran	%
				(Rp)	31/12/2024	(Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Kegiatan Perencanaan , Penganggar	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.195.600	35.367.386	3.828.214	90,23

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi s/d	Sisa Anggaran	%
				(Rp)	31/12/2024	(Rp)	
	Daerah Kabupaten/Kota	an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.092.800	21.434.000	4.658.800	82,15
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.600.000.000	4.188.729.406	411.270.594	91,06
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.534.000	21.059.000	2.475.000	89,48
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	690.000	310.000	69,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	500.000	190.000	310.000	38,00
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.480.000	20.796.000	2.684.000	88,57
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	95.189.920	93.940.000	1.249.920	98,69
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	131.004.200	119.795.500	11.208.700	91,44
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	2.986.000	14.000	99,53
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195.000.000	172.475.080	22.524.920	88,45
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000	69.195.000	805.000	98,85
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	7.510.000	490.000	93,88
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.795.000	96.394.239	20.400.761	82,53

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi s/d	Sisa Anggaran	%
				(Rp)	31/12/2024	(Rp)	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	219.500.000	217.109.000	2.391.000	98,91
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000	60.000.000	0	100
		KegiatanPen yediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.903.000	97.000	95,15
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.000.000	617.306.328	32.693.672	94,97
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	292.471.043	248.103.000	44.368.043	84,83
		Kegiatan Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	803.906.081	764.257.087,00	39.648.994	95,07
			Pemeliharaan Mebel	4.500.000	4.500.000	0	100,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	216.550.000	211.035.000,00	5.515.000	97,45
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	290.000.000	289.300.816,00	699.184	99,76
		2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	314.480.000	300.890.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	314.480.000				292.700.000,00	21.780.000	93,07
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	512.540.000				464.380.000	48.160.000	90,60
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	262.740.000				237.390.000	25.350.000	90,35
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	244.800.000				234400000	10.400.000	95,75
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	244.800.000				229200000	15.600.000	93,63

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi s/d	Sisa Anggaran	%
				(Rp)	31/12/2024	(Rp)	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	800.852.000	714.048.000,00	86.804.000	89,16
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	732.800.000	708.496.750	24.303.250	96,68
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	192.800.000	191.917.500	882.500	99,54
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	50.000.000	0	50.000.000	-
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	239.346.242	176.344.848,00	63.001.394	73,68
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	45.000.000	0	45.000.000	-
			Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kab/Kota	391.059.928	152.601.050	238.458.878	39,02
		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	538.249.000	534.543.600	3.705.400	99,31
			Penatausahaan Pembiayaan Daerah	211.651.000	199.434.250	12.216.750	94,23
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.245.459.884	6.528.210.544	717.249.340	90,10
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	209.700.000	199.286.000	10.414.000	95,03
		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	105.580.000	99.068.900	6.511.100	93,83

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi s/d	Sisa Anggaran	%
				(Rp)	31/12/2024	(Rp)	
	Pelaporan Keuangan Daerah		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	50.000.200	49.800.000	200.200	99,60
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawabana n Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	283.300.400	281.350.000	1.950.400	99,31
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	810.000.030	809.963.923	36.107	100,00
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawabana n Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawabana n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	613.478.240	613.120.475	357.765	99,94
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawabana n Pemerintah Kabupaten/Kota				
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Analisis Perencanaan dan PelaksanaanPemba yaran Cicilan Pokok dan Bunga	13.000.000.000	12.681.597.221	318.402.779	97,55
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	181.371.553.887	70.026.001.914	111.345.551.973	38,61
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.000.000.000	4.334.157.345	665.842.655	86,68
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	7.225.566.783	5.729.021.396	1.496.545.387	79,29
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementa si Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	229.321.200	219.002.850	10.318.350	95,50
			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	922.500.000	918.851.050	3.648.950	99,60

lan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi s/d	Sisa Anggaran	%
				(Rp)	31/12/2024	(Rp)	
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	458.391.000	313.030.070	145.360.930	68,29
			Pengamanan Barang Milik Daerah	748.627.750	580.878.000	167.749.750	77,59
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.308.861.350	1.278.638.927	30.222.423	97,69
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1.006.979.000	960.158.000	46.821.000	95,35
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	450.518.500	450.518.500	0	100,00

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Anggaran untuk Tahun 2025 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp7.871.718.644,- realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 Sebesar Rp 7.264.075.842,- atau 92,28% sisa pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp 607.642.802,00
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
Anggaran untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 222.162.058.794,- realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 206.925.777.616,- atau 93,14 %, sisa pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 15.236.281.178,-
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Anggaran untuk Tahun 2024 sebesar Rp3.973.377.600,- realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.583.223.497,- sebesar 90,18 %, sisa pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 390.154.103,-



BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan, sedangkan Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

Menurut peraturan perundang-undangan, satuan organisasi wajib menyajikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran, adalah basis kas untuk pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran serta basis akrual untuk pengakuan Pendapatan LO, Beban, Aset, Utang dan Ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual.

- 1. Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran**, berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
- 2. Basis Akrual untuk Laporan Operasional**, berarti bahwa pendapatan LO dan beban diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- 3. Basis Akrual untuk Laporan Perubahan Ekuitas**, berarti bahwa ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi

lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

- 4. **Basis AkruaI untuk Neraca**, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- 5. **Asas Bruto**, berarti pengakuan serta pencatatannya tidak diperkenankan secara netto, penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi.

4.3. **BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1. Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Pangandaran menganut Substansi mengungguli bentuk formalnya (*substance overform*).
- 2. Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (*modified accrual basis*) / kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*).
- 3. Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran adalah Tahun Anggaran 2024 (01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024).
- 4. Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dalam satuan uang.
- 5. Rekening yang digunakan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
- 6. Kas
 - a. Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas.
 - b. Kas di bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir Tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca.
 - c. Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil Kas Opname di bendahara.
- 7. Persediaan
 - a. Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

- b. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:
 - 1) Harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian.
 - 2) Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - 3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
 - c. Jenis-jenis persediaan:
 - 1) Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.
 - 2) Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal *file box*.
 - 3) Persediaan Bekas Pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan.
 - 4) Persediaan untuk dijual, misal aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit, benih ikan dan lain sebagainya.
8. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) Tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

4.4.1. KEBIJAKAN AKUNTANSI ANGGARAN

- a. Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/penilaian.
- b. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran meliputi rencana belanja yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klarifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- c. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- d. Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, serta pada saat anggaran dialokasikan.

4.4.2. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

- a. Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan belanja.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi.
- c. Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit Organisasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- d. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan.
- e. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan.
- f. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan.
- g. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- h. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah.
- i. Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah.
- j. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima

pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya).

- k. Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas.

4.4.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

- a. Kebijakan akuntansi aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi aset meliputi definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan aset.
- b. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang.
- c. Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Pangandaran namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, dan kelestarian aset agar semua aset terdaftar dan terawasi.
- d. Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkapkan, namun biaya rekontruksi, pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja Tahun terjadinya pengeluaran.
- e. Suatu aset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi kala aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- f. Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah.
- g. Untuk pertanggungjawaban, aset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- h. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan.
- i. Aset tidak dicatat atau tidak diketahui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran setelah periode akuntansi berjalan

- j. Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
- k. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan.
- l. Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya aktifitas operasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. POS-POS BELANJA- LRA

5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada kas di bendahara penerimaan dan rekening kas daerah berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto atau nilai nominal yang tertera pada dokumen bukti penerimaan atau dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai dengan posnya masing-masing, dan tidak mencatat jumlah netto nya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Realisasi Pendapatan Daerah s.d Bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp. 1.190.588.561.809,00 atau mencapai 101,31 % dari anggaran sebesar Rp 1.175.190.151.895,00. Realisasi pendapatan mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp. 1.089.822.337.626,00. Realisasi Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1
Rincian Realisasi dan Anggaran Pendapatan s.d Bulan Desember Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.175.190.151.895,00	1.190.588.561.809,00	101,31	1.089.822.337.626,00
	Jumlah	1.175.190.151.895,00	1.190.588.561.809,00	101,31	1.089.822.337.626,00

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA). PAD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 1.175.190.151.895,00 terealisasi sebesar Rp 1.190.588.561.809,00 atau 101,31 % dan realisasi Tahun sebelumnya sebesar Rp 1.089.822.337.626.

Tabel 5.1.1.1
Rincian Realisasi dan Anggaran PAD s.d Bulan Desember TA 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	830.000.000,00	525.178.733,00	63,27	602.205.428,00
2	Lain-lain PAD yang Sah	1.035.000.000,00	7.703.910.680,00	744,34	7.269.577.301,00
	Jumlah	1.865.000.000,00	8.229.089.413,00	441,24	7.871.782.729,00

5.1.1.1.1 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 terealisasi s.d bulan Desember adalah sebesar Rp 525.178.733,00 atau 63,27 % dari anggaran sebesar Rp 830.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 602.205.428,00.

..

Tabel 5.1.1.1.1
Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan s.d Bulan Desember TA 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	830.000.000,00	525.178.733,00	63,27	602.205.428,00
	Jumlah	830.000.000,00	525.178.733,00	63,27	602.205.428,00

5.1.1.1.2. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp 1.035.000.000,00 terealisasi s.d Bulan Desember 2024 sebesar Rp7.703.910.680,00 atau 744,34 %. Realisasi Tahun 2023 sebesar Rp 7.269.577.301,00

Tabel 5.1.1.1.2
Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah s.d Bulan Desember TA 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Jasa Giro	1.000.000.000,00	901.227.937,00	90,12	1.134.849.569,00
2	Pendapatan Bunga	-	181.047.499,00	-	-
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	35.000.000,00	3.800.000,00	10,86	5.900.000,00
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	198.302.531,00	-	3.189.698.506,00
5	Pendapatan dari Pengembalian	-	5.780.270.843	-	2.489.714.145,00
6	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	582.441.920,00	-	115.989.633,00
	Jumlah	1.035.000.000,00	7.703.910.680,00	744,34	7.269.577.301,00

5.1.2 BELANJA

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Realisasi Belanja Daerah TA 2024 S.d Bulan Desember 2024 sebesar Rp. 217.719.634.215,00 atau 93,04% dari anggaran sebesar Rp. 234.007.155.038,14 sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 197.787.033.394,00 Realisasi Belanja Daerah terdiri dari beberapa jenis belanja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2

Anggaran dan Realisasi Belanja s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	51.463.461.487,14	38.191.156.768,00	74,21	34.966.038.051,00
2	Belanja Modal	214.847.068,00	212.509.000,00	98,91	999.731.000,00
3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	4.334.157.345,00	86,68	2.587.406.924,00
4	Belanja Transfer	177.328.846.483,00	174.981.811.102,00	98,68	159.233.857.419,00
	Jumlah	234.007.155.038,14	217.719.634.215,00	93,04	197.787.033.394,00

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi TA 2024 s.d Bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp 38.191.156.768,00 atau 74,21% dari anggaran sebesar Rp 51.463.461487,14, sedangkan realisasi Tahun sebelumnya sebesar Rp 34.966.038.051,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	21.761.714.071,00	10.092.337.125,00	46,38	7.099.273.625,00
2	Belanja Barang dan Jasa	16.701.747.416,14	15.417.222.422,00	92,31	15.728.049.140,00
3	Belanja Bunga	13.000.000.000,00	12.681.597.221,00	97,55	12.138.715.286,00
	Jumlah	51.463.461.487,14	38.191.156.768,00	74,21	34.966.038.051,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 adalah sebesar Rp 10.092.337.125 atau 74,21 % dari anggaran sebesar Rp 21.761.7114.071,00 sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp 7.009.273.625,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	18.991.843.999,00	7.623.117.297,00	40,14	5.303.915.970,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.290.430.072,00	2.056.352.801,00	89,78	1.401.507.655,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	479.440.000,00	412.867.027,00	86,11	393.850.000,00
	Jumlah	21.761.714.071,00	10.092.337.125,00	46,38	7.099.273.625,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 s.d Bulan Desember adalah sebesar Rp 15.417.222.422,00 atau 92,31 % dari anggaran sebesar Rp 16.701.747.416.14 sedangkan realisasi Tahun sebelumnya sebesar Rp 15.728.049.140,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi sd Desember 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Barang	1.159.905.046,00	992.683.189,00	85,58	831.401.291,00
2	Belanja Jasa	13.117.190.000,00	12.322.577.918,00	93,94	13.320.972.005,00
3	Belanja Pemeliharaan	743.200.000,00	728.885.964,00	98,07	328.309.924,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	1.681.452.370,14	1.373.075.351,00	81,66	1.247.365.920,00
	Jumlah	16.701.747.416,14	15.417.222.422,00	92,31	15.728.049.140,00

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang s.d Bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp 992.683.189,00 atau 85,58% dari anggaran sebesar Rp 1.159.905.046,00 yang merupakan Belanja Barang Pakai Habis. Sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp 831.401.291,00.

1. A Belanja Barang Pakai Habis

Relaisasi belanja barang pakai habis s.d Bulan desember tahun 2024 adalah sebesar Rp. 992.683.189,00 atau 85,58% dari total anggaran sebesar Rp. 1.159.905.046,00. sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 831.401.291,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Belanja Barang Habis Pakai
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi sd Desember 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	181.377.681,00	155.810.000,00	85,90	145.775.000,00
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-	4.500.000,00
3	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	157.898.400,00	156.569.339,00	99,16	91.260.263,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	239.244.717,00	217.015.080,00	90,71	121.150.728,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	159.678.285,00	145.681.270,00	91,23	176.441.160,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.910.000,00	5.990.000,00	75,73	3.500.000,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.000.000,00	2.986.000,00	99,53	4.000.000,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.572.043,00	14.461.500,00	99,24	22.840.000,00
9	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-	-	49.500.000,00
10	Belanja Natura dan Pakan-Natura	16.494.000,00	16.440.000,00	99,67	18.205.000,00

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2024

11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	219.115.000,00	135.525.000,00	61,85	122.180.000,00
12	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	16.075.000,00	13.790.000,00	85,79	6.041.500,00
13	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	47.850.000,00	32.975.000,00	68,91	41.257.640,00
14	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	50.000.000,00	49.740.000,00	99,48	-
15	Belanja Pakaian Batik Tradisional	45.189.920,00	44.200.000,00	97,81	24.750.000,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
	Jumlah	1.159.905.046,00	992.683.189,00	85,58	831.401.291,00

2. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa tahun 2024 adalah sebesar Rp 12.322.577.918,00 atau 93,94 % dari anggaran sebesar Rp 13.117.190.000,00 sedangkan realisasi Tahun sebelumnya sebesar Rp 13.320.972.005,00 . Rincian Belanja Jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Belanja Jasa
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi sd Desember 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	9.984.065.000,00	9.224.518.678,00	92,39	8.998.739.589,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.378.494.400,00	1.370.239.320,00	99,40	1.336.145.104,00
3	Belanja Sewa Tanah	1.001.295.600,00	1.001.295.600,00	100,00	940.183.662,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	445.380.000,00	442.030.000,00	99,25	195.000.000,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	190.625.000,00	168.375.000,00	88,33	324.995.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	117.330.000,00	116.119.320,00	98,97	246.741.900,00
7	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	1.279.166.750,00
	Jumlah	13.117.190.000,00	12.322.577.918,00	93,94	13.320.972.005,00

3. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2024 adalah sebesar Rp 728.885.964,00 atau 98,07 % dari anggaran sebesar Rp 743.200.000,00 sedangkan realisasi Tahun sebelumnya sebesar Rp328.309.924,00. Rincian Belanja Pemeliharaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Belanja Pemeliharaan

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi sd Desember 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	303.200.000,00	293.009.648,00	96,64	168.132.624,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	290.000.000,00	289.300.816,00	99,76	160.177.300,00
3	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	150.000.000,00	146.575.500,00	97,72	-
Jumlah		358.000.000,00	328.309.924,00	91,71	360.395.318,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

4. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2024 sd Bulan Desember adalah sebesar Rp 1.373.075.351,00 atau 81,66% dari anggaran sebesar Rp 1.681.452.370,00, sedangkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp.1.247.365.920,00. Rincian Belanja Perjalanan Dinas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Perjalanan Dinas
Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.801.801.900,00	1.206.782.920,00	66,98	1.386.778.999,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	88.139.000,00	40.583.000,00	46,04	54.942.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12.500.000,00	-	-	-
Jumlah		1.902.440.900,00	1.247.365.920,00	65,57	1.441.720.999,00

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga TA 2024 s.d Bulan Desember adalah sebesar Rp. 12.138.715.286 atau 97,55% dari anggaran sebesar Rp. 13.000.000.000. Belanja bunga tersebut merupakan bunga atas pinjaman daerah ke Bank bjb.

5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2024 s.d Bulan Desember adalah sebesar Rp 212.509.000,00 atau 98,91% dari anggaran sebesar Rp. 214.847.068, realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 999.731.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi sd Desember 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	383.749.500,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	214.847.068,00	212.509.000,00	98,91	615.981.500,00
3	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	44.124.120,00	44.070.000,00	99,88	70.117.000,00
4	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.650.000,00	4.645.000,00	99,89	-
5	Belanja Modal Komputer	166.072.948,00	163.794.000,00	98,63	33.400.000,00
Jumlah		1.523.856.000,00	999.731.000,00	65,61	586.117.830,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2024 s.d Bulan Desember adalah sebesar Rp. 212.509.000,00 atau 98,91% dari anggaran sebesar Rp.214.847.068,00. realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 615.981.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi sd Desember 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	512.464.500,00
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	44.124.120,00	44.070.000,00	99,88	70.117.000,00
3	Belanja Modal Alat Studio	4.650.000,00	4.645.000,00	99,89	-
4	Belanja Modal Komputer	166.072.948,00	163.794.000,00	98,63	33.400.000,00
Jumlah		214.847.068,00	212.509.000,00	98,91	615.981.500,00

5.1.2.2 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 s.d Bulan Desember adalah sebesar Rp, 4.334.157.345,00 atau 86,68 % dari anggaran sebesar Rp 5.000.000.000,00. Sedangkan pada tahun sebelumnya terelalisasi sebesar Rp. 2.587.406.924,00.

5.1.2.3 Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer TA 2024 s.d Bulan Desember adalah sebesar Rp. 174.981.811.102,00 atau 98,68% dari anggaran sebesar Rp. 177.328.846.483,00. Realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 159.233.857.419,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.418.194.980,00	1.360.752.947,00	16,16	1.500.000.000,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.491.837.100,00	133.539.270,00	3,82	2.570.784.586,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	165.124.745.500,00	157.739.565.202,00	95,53	177.318.163.042,00
	Jumlah	177.034.777.580,00	159.233.857.419,00	89,94	181.388.947.628,00

5.1.2.4 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2024 s.d Bulan Desember adalah sebesar Rp. 219.242.820.471,74 atau 41,23% dari anggaran sebesar Rp 531.742.820.471,74 sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 200.019.363.535,55 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.5
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	574.103.534.489,00	200.019.363.535,55	34,84	169.370.240.623,05
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	100,00	153.599.999.230,00
	Jumlah	724.103.534.489,00	350.019.363.535,55	48,338303	322.970.239.853,05

5.2. POS-POS NERACA

5.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp95.819.845.386,08 mengalami kenaikan sebesar Rp3.358.647.935,25 atau 3,63 % dari saldo Aset tahun sebelumnya sebesar Rp92.461.197.450,83 Tahun 2024 terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut

5.1.1 ASET LANCAR

Nilai Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 1.554.559.080,00 mengalami penurunan sebesar Rp756.159.463,29 atau (32,72)% Dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.310.718.543,29 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024 (Rp.)	Saldo 31 Desember2023 (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	231.662.000,00	231.662.000,00	0	0
2	Piutang Transfer Antar Daerah	1.486.440.430,00	2.218.462.719,00	(732.022.289,00)	(32,99)
3	Piutang Lainnya	5.800.000,00	2.951.000,00	2.849.000,00	96,54
4	Penyisihan Piutang	(213.600.000,00)	(215.600.000,00)	2.000.000,00	0,93
5	Persediaan	44.256.650,00	73.242.824,29	(28.986.174,29)	(39,58)
	Jumlah	1.554.559.080,00	2.310.718.543,29	(756.159.463,29)	-32,72

5.1.1.1 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang lain lain PAD yang sah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing masing sebesar Rp231.662.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Piutang Lain Lain PAD yang sah per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024 (Rp.)	Saldo 31 Desember2023 (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	212.700.000,00	212.700.000,00	0,00	0
2	Piutang Pendapatan Lain-lain yg sah	18.962.000,00	18.962.000,00	0,00	0
	Jumlah	231.662.000,00	231.662.000,00	1.151.000,00	0,4

5.1.1.2 Piutang Transfer Antar Daerah

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.486.440.430,00 sedangkan saldo akhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 2.218.462.719,00 .dengan rincian sebagai berikut

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo	Saldo	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)		
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	500.221.170,00	353.881.590,00	146.339.580,00	41,35
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	620.469.798,00	199.537.500,00	420.932.298,00	210,95
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar	365.558.212,00	1.664.836.629,00	(1.299.278.417,00)	(78,04)
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	191.250,00	207.000,00	(15.750,00)	(7,61)
	jumlah	1.486.440.430,00	2.218.462.719,00	(732.022.289,00)	(33,00)

5.1.1.3 Piutang Lainnya

Saldo Piutang lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.800.000,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp2.849.000,00 atau 96,54% dari saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.951.000,00

No	Uraian	Saldo	Saldo	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)		
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	5.800.000,00	2.951.000,00	2.849.000,00	96,54
	jumlah	5.800.000,00	2.951.000,00	(2.849.000,00)	

5.1.1.4 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(213.600.000,00) sedangkan saldo akhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(215.600.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis Aset Lancar	Saldo	Saldo	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)		
1	Penyisihan Piutang Pendapatan	(212.700.000,00)	(212.700.000,00)	0,00	0,00
2	Penyisihan Piutang Lainnya	(900.000,00)	(2.900.000,00)	2.000.000,00	(68.96)
	Jumlah	(213.600.000,00)	(215.600.000,00)	2.000.000,00	0,92

5.1.1.5 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp44.256.650,00 sedangkan saldo persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 73.242.824,29 terjadi penurunan sebesar (Rp28.986.174,29) atau sebesar (39,58) % dengan rincian sebagai berikut

No	Jenis Aset Lancar	Saldo	Saldo	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)		
1	Alat Tulis Kantor	44.256.650,00	16.023.072,00	28.233.578,00	176,21
2	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0	57.219.752,29	(57.219.752,29)	(100,00)
	Jumlah	44.256.650,00	73.242.824,29	(28.986.174,29)	39,58

Nilai aset lancar tersebut di atas sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan pada tanggal 31 Desember 2023 juga berdasarkan perhitungan masuk-keluarnya barang persediaan selama tahun 2024 yang dicatat secara berkala setiap bulannya pada kartu persediaan barang. Secara ringkas, masuk dan keluarnya barang persediaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran selama tahun 2024 dapat diketahui sebagai berikut:

Kode	Uraian	Nilai (Rp.)
A	Masuk (Penambahan)	
B	Persediaan per 31 Desember 2023	73.242.824,29
C	Penambahan per Desember Tahun 2024	992.683.189,00
Kode	Uraian	Nilai (Rp.)
D	Jumlah Masuk/Penambahan (B+C)	1.065.926.013,29
E	Keluar (Pengurangan)	

Kode	Uraian	Nilai (Rp.)
F	Pengurangan Reguler (Beban Persediaan)	1.021.669.363,29
G	Pengurangan karena:	
G.1	a. Kapitalisasi ke Aset Tetap	0,00
G.2	b. Hasil belanja Jasa yg menjadi persediaan dan telah habis digunakan	0,00
H	Jumlah Keluar/ Pengurangan (F+G.1+G.2)	1.021.669.363,29
I	Saldo Persediaan per Desember 2023 (D-H)	44.256.650,00

5.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang di Kabupaten Pangandaran adalah investasi Jangka Panjang Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak direncanakan untuk dijual kembali. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 yang merupakan Penyertaan modal sebesar Rp25.120.671.012,60 dengan rincian sebagai berikut::

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan 2023					
No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Penyertaan Modal ke PDAM	11.257.568.641,00	11.815.734.231,60	(558.165.590,60)	(4,72)
2	Penyertaan Modal kepada BPR/BKPD Pangandaran	10.263.103.141,60	9.913.173.008,00	349.930.133,60	(3,52)
3	Penyertaan Modal kepada BPR/BKPD BJB	3.599.999.230,00	3.599.999.230,00	0	100,00
	JUMLAH	25.120.671.012,60	25.328.906.469,60	(-208.235.457,00)	(0,8)

Penyertaan modal PDAM sebesar Rp11.815.734.231,60 merupakan nilai ekuitas akhir PDAM Tirta Prabawa Mukti berdasarkan Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PDAM Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran *Audited* per 31 Desember 2023. Penyertaan modal kepada bjb sebesar Rp3.599.999.230,00 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. No. DE/III/2022-2921 dengan kepemilikan saham sebanyak 2.656.826 lembar.

Penyertaan modal BPR BKPD Pangandaran sebesar Rp9.516.594.940,00 merupakan nilai ekuitas akhir BKPD Pangandaran berdasarkan Laporan Tahunan Perumda BPR BKPD Pangandaran *Audited* per 31 Desember 2024.

Penyertaan modal tersebut merupakan gabungan penyertaan modal BKPD Cijulang dan BKPD Pangandaran yang telah bergabung menjadi Perumda BPR BKPD Pangandaran berdasarkan keputusan Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : KEP-120/D.03/2022 Tentang pemberi izin penggabungan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cijulang ke dalam Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran pada tahun 2022

5.1.3 ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk fasilitas umum/sosial.

Nilai buku Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp68.745.222.238,91 dan Rp64.422.179.381,37 yang terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, dan akumulasi penyusutan. Dari keenam jenis aset tetap tersebut, terdapat 4 jenis aset tetap yang disusutkan yaitu Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Gedung dan Bangunan, Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Metode penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus atau nilai penyusutan diberlakukan sama setiap tahun sampai masa manfaat aset tersebut habis. Berikut adalah rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis Aset Tetap	Saldo	Saldo	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)		
1	Tanah	66.802.508.226,76	61.405.167.192,22	5.397.341.034,54	8,79
2	Peralatan dan Mesin	14.643.725.441,15	14.000.103.792,15	643.621.649,00	4,60
3	Gedung dan Bangunan	545.520.813,00	545.520.813,00	0,00	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	235.194.600,00	235.194.600,00	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00
6	Akumulasi Penyusutan	(13.482.371.842,00)	(11.764.452.014,00)	(1.717.919.828,00)	0,00
	Jumlah	68.745.222.238,91	64.422.179.383,37	4.323.042.855,54	14,60

Terdapat kenaikan Aset Tetap sebesar Rp4.323.042.855,54 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 64.422.179.383,37 .Kenaikan Aset Tetap tersebut disebabkan mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2024

NO	JENIS ASET	SALDO AWAL (Rp.)	MUTASI		SALDO AKHIR (Rp.)
			TAMBAH (Rp.)	KURANG (Rp.)	
1.	Tanah	61.405.167.192,22	9.317.282.391,00	3.919.941.356,46	66.802.508.226,76
2.	Peralatan dan mesin	14.000.103.792,15	1.719.642.499,00	1.076.020.850,00	14.643.725.441,15

NO	JENIS ASET	SALDO AWAL (Rp.)	MUTASI		SALDO AKHIR (Rp.)
			TAMBAH (Rp.)	KURANG (Rp.)	
3.	Gedung Dan Bangunan	545.520.813,00	-	-	545.520.813,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	235.194.600,00	-	-	235.194.600,00
5.	Aset Tetap Lainnya	645.000,00	-	-	645.000,00
6.	Akumulasi Penyusutan	(11.764.452.014,00)	(2.307.338.418,00)	(589.418.590,00)	(13.482.371.842,00)
JUMLAH		64.422.179.383,37	9.729.586.472	4.406.543.616,46	68.745.222.238,91

1. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp66.802.508.226,76 mengalami kenaikan sebesar Rp5.397.341.034,54 atau 8,79 % dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp61.405.167.192,22

2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.643.725.441,15 mengalami kenaikan sebesar Rp643.621.649,00 atau 4,60% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp14.000.103.792,15

Rincian peralatan dan mesin tahun 2024 dan tahun 2023

No	Jenis Aset Tetap	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023(Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Alat angkutan	10.235.881.814,15	9.806.269.165,15	429.612.649,00	4,38
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	54.207.500,00	54.207.500,00	0,00	0,00
3	Alat Pertanian	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.010.222.359,00	966.152.359,00	44.070.000,00	4,56
5	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	244.874.900,00	240.229.900,00	4.645.000,00	1,93
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	972.568.436,0 0	972.568.436,00	0,00	0,00
7	Alat Laboratorium	230.139.100,00	230.139.100,00	3.150.000,00	1,37
8	Alat Persenjataan	42.140.500,00	45.290.500,00	(3.150.000,00)	(6,96)
9	Komputer	1.791.340.832,00	1.626.046.832,00	165.294.000,00	10,17
10	Alat Keselamatan Kerja	44.900.000,00	44.900.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	14.643.725.441,15	14.000.103.792,15	643.621.649,00	4,60

Penjelasan penambahan dan pengurangan saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2024 adalah dengan rincian sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2023		Rp.	14.000.103.792,15
Penambahan karena			
a.	Belanja Modal Tahun 2023 (LRA)	Rp.	212.509.000,00
b.	Aset tetap mutasi dari SKPD lain		1.505.633.499,00
c.	Reklasifikasi dari belanja barang & jasa menjadi aset tetap		1.500.000,00
Jumlah Penambahan		Rp.	1.719.642.499,00
Pengurangan karena:			
c.	Mutasi Ke SKPD Lain / Dinas	Rp.	563.556.350,00
d.	Aset yang dihibahkan Ke Pihak Ketiga	Rp.	512.464.500,00
e.	Reklasifikas Aset Tetap ke Aset Lainnya (Rusak Berat, Lapuk, Hancur, Hilang,dll)	Rp.	
f.	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Barang Extracomtable	Rp.	
Jumlah Pengurangan			1.076.020.850,00
Saldo Akhir per 30 Desember 2024		Rp.	14.643.725.441,15

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp545.520.813,00 sama dengan nilai saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp545.520.813,00 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan , Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 235.194.600,00 sama dengan nilai saldo Jalan ,Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 235.194.600,00 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 645.000,00 sama dengan dari saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 645.000,00.

6. Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam

pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas aset tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Perhitungan Penyusutan berdasarkan pendekatan bulanan, dengan Laporan Penyusutan secara Semesteran.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp13.482.371.842,00) mengalami penambahan sebesar (Rp1.717.919.828,00) dari Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar (Rp.11.764.452.014,00)

Adapun Akumulasi Aset Tetap diterapkan pada 3 jenis aset tetap yaitu Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:.

Rincian Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024

Nama Aset	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023	Koreksi Mutasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024
Peralatan dan Mesin	(11.340.487.087,00)	(1.672.281.848,00)	-	(13.012.768.935,00)
Gedung dan Bangunan	(264.498.439,00)	(23.113.360,00)	-	(287.611.799,00)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(159.466.488,00)	(22.524.620,00)	-	(181.991.108,00)
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	(11.764.452.014,00)	(1.717.919.828,00)	-	(13.482.371.842,00)

Koreksi Mutasi Penyusutan ada dikarenakan perhitungan Akumulasi Penyusutan dilakukan selama satu tahun anggaran pada akhir tahun.

5.1.4 ASET LAINNYA

Nilai aset lainnya Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 399.393.054,57 merupakan saldo aset lainnya per 31 Desember 2023, tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Rincian Aset Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Jenis Aset	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset tidak berwujud	65.912.000,00	65.912.000,00	0,00	0,00
2	Aset lain lain	2.259.475.291,00	2.259.475.291,00	0,00	0,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(65.912.000,00)	(65.912.000,00)	0,00	0,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.860.082.236,43)	(1.860.082.236,43)	0,00	0,00
	Jumlah	399.393.054,57	399.393.054,57	0,00	0,00

5.2 KEWAJIBAN

5.2.1 Kewajiban jangka pendek

Nilai Kewajiban Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp143.757.409.052,71 dan Rp117.546.384.579,31 Nilai kewajiban per 31 Desember 2024 bersumber dari Utang Belanja yaitu:

Rincian kewajiban jangka pendek

URAIAN	Nilai (Rp.)
Utang Pinjaman Jangka Pendek	22.000.762.508,67
Utang Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Pendek	1.000.762.508,67
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) BUMD Jangka pendek	21.000.000.000,00
Utang Belanja Pegawai	10.856.449.250,00
Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	42.637.030,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.548.504.719,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	156.584.594,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.375.406,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	105.347.501,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	197.856.356,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,Pembawa Acara, dan Panitia	6.000.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	126.600.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	5.600.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	5.600.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	1.800.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	45.553.500,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	583.807,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	5.319.049,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Lembur	800.000,00
Utang Belanja Tidak Terduga	15.614.126.276,00
Utang Belanja Tidak Terduga	15.614.126.276,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	95.088.214.662,04
Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	52.953.543.465,40
Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepda Pemerintah Desa	42.084.671.196,64
Utang Belanja Bantuan Keuangan	50.000.000,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	50.000.000,00
JUMLAH	143.757.409.052,71

5.2.1.1 Utang pinjaman jangka pendek

Utang pinjaman Jangka pendek per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp22.000.762.508,67 sedangkan utang pinjaman jangka pendek per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.000.762.508,67 dengan Rincian sebagai berikut

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023(Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Pinjaman dari LKB-BUMN- Jangka Pendek	1.000.762.508,67	1.000.762.508,67	0,00	0,00
2	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) BUMD Jangka pendek	21.000.000.000,00	0	0,00	0,00

5.2.1.2 Utang belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10.856.449.250,00 sedangkan pada tahun sebelumnya terdapat Utang Belanja Pegawai dengan rincian Utang Belanja Pegawai pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Utang belanja pegawai tahun 2024 dan tahun 2023

No	Utang Belanja Pegawai	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Gaji Pokok PNS	42.637.030,00	41.046.571,00	1.590.459,00	3,87
2	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.548.504.719,00	11.268.274.187,00	(719.769.468,00)	6,39
3	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	156.584.594,00	304.581.000,00	(147.996.406,00)	48,59
4	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.375.406,00	9.315.000,00	(5.939.594,00)	63,76
5	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	105.347.501,00	77.821.229,00	27.526.272,00	35,37
	Jumlah	10.856.449.250,00	11.701.037.987,00	(844.588.737,00)	7,22

5.2.1.3 Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp197.856.356,00 mengalami Kenaikan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp55.986.049,00 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut

Rincian Utang Barang dan Jasa tahun 2024 dan tahun 2023

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,Pembawa Acara, dan Panitia	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	(100)
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	126.600.000,00	0,00	126.600.000,00	0,00
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	45.553.500,00	47.000.000,00	(1.446.500,00)	3,08
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	583.807,00	578.257,00	5.550,00	0,96
9	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	5.319.049,00	5.207.792,00	111.257,00	2,14
10	Utang Belanja Jasa Kantor-Lembur	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
	Jumlah	197.856.356,00	55.986.049	141.870.307,00	253,40

5.2.1.4 Utang Belanja Tak Terdugaa

Saldo Utang Belanja Tak Terduga per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.614.126.276,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.505.672.179 dari tahun sebelumnya sebesar Rp19.119.798.455,00 atau sebesar 18,33 %

5.2.1.5 Utang Belanja Bagi Hasil

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp95.038.214.662,04 dan Saldo Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp85.618.799.579,64 dengan rincian sebagai berikut

No	Utang Belanja Barang dan Jasa	Saldo Per 30 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	52.953.543.465,40	48.111.415.411,40	4.842.128.054,00	10,06
2	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	42.084.671.196,64	37.507.384.168,24	4.577.287.028,40	12,20
	Jumlah	95.038.214.662,04	85.618.799.579,64	9.419.415.082,40	11,00

5.2.1.6 Utang Belanja Bantuan Keuangan

Saldo Utang Belanja Bantuan Keuangan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 merupakan saldo utang belanja bantuan keuangan per 31 Desember 2023

5.1 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Badan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp (48.281.101.972,63) yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

1) Aset	Rp	95.819.845.386,08
2) Kewajiban	Rp	143.757.409.052,71
3) Ekuitas	Rp	(47.937.563.666,63)

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan akun-akun Laporan Operasional (LO) menguraikan secara singkat mengenai saldo-saldo akun LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana disajikan pada muka laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

5.4.1 KEGIATAN OPERASIONAL

5.4.1.1 PENDAPATAN - LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Operasional diakui saat timbulnya hak atau saat pendapatan direalisasikan.

Pendapatan - LO pada Tahun 2024 sebesar Rp 1.190.046.373.919,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 108.925.642.119,00 atau 10,08 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.081.120.731.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1
Rincian Pendapatan Operasional Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.551.444.373,00	7.886.944.729,00	664.499.644,00	8,43
	a. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	525.178.733,00	602.205.428,00	(77.026.695,00)	(12,79)
	b. Lain-lain PAD Yang Sah	8.026.265.640,00	7.284.739.301,00	741.526.339,00	10,18
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.181.300.195.107,00	1.073.233.787.071,00	108.066.408.036,00	10,07
	a. Transfer Pemerintah Pusat	947.389.955.620,00	880.868.996.197,00	66.520.959.423,00	7,55
	b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	233.910.239.487,00	192.364.790.874,00	41.545.448.613,00	21,60
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	327.255.000,00	0,00	327.255.000,00	100,00
	Jumlah	1.189.859.388.520,00	1.081.120.731.800,00	108.738.656.720,00	10,06

5.4.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8.551.444.373,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 664.499.644,00 atau 8,43 % dari pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp 7.886.944.729,00 . Kenaikan tersebut merupakan kenaikan dari sektor Lain-lain PAD Yang Sah yang dapat dilihat pada tabel di bawah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO terdiri atas 2 jenis pendapatan yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.1
Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan 2023

NO	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	525.178.733,00	602.205.428,00	(77.026.695,00)	(12,79)
3	Lain-lain PAD yang Sah-LO	8.026.265.640,00	7.284.739.301,00	741.526.339,00	10,18
	Jumlah	8.551.444.373,00	7.886.944.729,00	664.499.644,00	8,43

5.4.1.1.2Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 525.178.733,00 mengalami penurunan sebesar Rp (77.026.695,00) atau (12,79) % dari tahun lalu sebesar Rp. 602.205.428,00.

5.4.1.1.3Lain-Lain PAD Yang Sah – LO

Lain-lain PAD Yang Sah merupakan jenis PAD yang tidak termasuk dalam kategori pajak atau retribusi daerah, termasuk di dalamnya yaitu Pendapatan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Pendapatan TGR, Pendapatan Denda, Pendapatan Pengembalian, Pendapatan Kapitasi dan Non Kapitasi, dan Lain-lain PAD yang sah lainnya.

Lain-lain PAD Yang Sah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 8.026.265.640,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 741.526.339,00 atau 10,18 % dari pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp 7.284.739.301,00 . Lain-lain PAD Yang Sah tersebut terdiri atas 6 jenis pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.100
Rincian Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per	Saldo per	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)		
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	4.176.000,00	83.945.460,00	(79.769.460,00)	(95,03)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	56.885.840,00	(56.885.840,00)	(100,00)
3	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	0,00	261.679.420,00	(261.679.420,00)	(100,00)
4	Jasa Giro-LO	944.541.999,00	901.227.937,00	43.314.062,00	4,81
5	Pendapatan Bunga-LO	193.026.387,00	181.047.499,00	11.978.888,00	6,62
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	198.302.531,00	3.189.698.506,00	(2.991.395.975,00)	(93,78)
8	Pendapatan dari Pengembalian -LO	5.780.270.843,00	2.489.714.145,00	3.290.556.698,00	132,17
9	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	4.550.861,00	(4.550.861,00)	(100,00)

No	Uraian	Saldo per	Saldo per	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)		
10	Pendapatan Lain-lain yg sah - LO	901.516.880,00	115.989.633,00	785.527.247,00	677,24
	Jumlah	8.026.265.640,00	7.284.739.301,00	741.526.339,00	10,18

5.4.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER –LO

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya berupa Dana Perimbangan seperti Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi, Pendapatan Hibah, dll.

Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.181.300.195.107,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 108.066.408.036,00 atau 10,07 % dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 1.073.233.787.071,00 .

Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.2
Rincian Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per	Saldo per	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)		
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	947.389.955.620,00	880.868.996.197,00	66.520.959.423,00	7,55
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	233.910.239.487,00	192.364.790.874,00	41.545.448.613,00	21,60
	Jumlah	1.181.300.195.107,00	1.073.233.787.071,00	108.066.408.036,00	10,07

5.4.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO

Transfer Dana Perimbangan Tahun 2024 adalah sebesar Rp 822.686.642.360,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 73.935.675.813,00 atau 9,87% dari transfer tahun sebelumnya sebesar Rp 748.750.966.547,00. Transfer Dana Perimbangan merupakan transfer dari Pemerintah Pusat yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.2.1
Rincian Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo	Saldo	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		per 31 Desember 2024 (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)		
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	71.433.031.000,00	53.995.044.000,00	17.437.987.000,00	32,30
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	551.850.983.825,00	527.477.779.980,00	24.373.203.845,00	4,62
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	63.473.106.623,00	33.845.756.074,00	29.627.350.549,00	87,54

No	Uraian	Saldo	Saldo	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		per 31 Desember 2024 (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)		
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	135.929.520.912,00	133.432.386.493,00	2.497.134.419,00	1,87
	Jumlah	822.686.642.360,00	748.750.966.547,00	73.935.675.813,00	9,87

5.5.1.1.2.1 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah merupakan transfer dari Pemerintah Pusat ke Kab/Kota, pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak memperoleh Pendapatan Dana Insentif Daerah.

5.6.1.1.2.1 Dana Desa

Dana Desa merupakan alokasi Dana Desa dari APBN Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 99.946.557.260,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.694.791.610,00 atau 2,77 % dari Tahun sebelumnya sebesar Rp. 97.251.765.650,00.

5.4.1.2 BEBAN OPERASI

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional Tahun 2024 adalah sebesar Rp 41.948.330.368,75 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.442.283.333,37 atau 11,84% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 37.506.047.035,38. Beban Operasional Tahun 2024 terdiri atas 7 jenis beban sesuai dengan klasifikasi yang diatur dalam SAP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.2
Rincian Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per	Saldo per	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)		
1	Beban Pegawai	9.247.748.388,00	8.193.287.732,00	1.054.460.656,00	12,87
2	Beban Barang dan Jasa	15.537.078.903,29	14.844.186.835,00	692.892.068,29	4,67
3	Beban Bunga	12.681.597.221,00	12.138.715.286,00	542.881.935,00	4,47
4	Beban Hibah	4.481.905.856,46	2.329.857.182,38	2152.048.674,08	92,37
	Jumlah	41.948.330.368,75	37.506.047.035,38	4.442.283.333,37	11,84

5.4.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai tahun 2024 adalah sebesar Rp 9.247.748.388,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.054.460.656,00 atau 12,87 % dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp 8.193.287.732,00 Rincian beban pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.2.1

Rincian Beban Pegawai
Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per	Saldo per	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)		
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	6.904.938.288,00	6.028.302.848,00	876.635.440,00	14,54
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.929.943.073,00	1.793.224.884,00	136.718.189,00	7,62
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	412.867.027,00	371.760.000,00	41.107.027,00	11,06
	Jumlah	9.247.748.388,00	8.193.287.732,00	1.054.460.656,00	12,87

5.4.1.2.2 Beban Barang/Persediaan

Beban Barang/Persediaan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 970.669.363,29 mengalami kenaikan sebesar Rp 132.238.660,00 atau 15.77 % dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp. 838.430.703,00 . Rincian beban barang/persediaan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.2.2
Rincian Beban Persediaan per Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per	Saldo per	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)		
	Beban Barang Pakai Habis				
1	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	155.810.000,00	145.775.000,00	10.035.000,00	6,88
2	Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(100,00)
3	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	156.569.339,00	91.260.263,00	65.309.076,00	71,56
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	188.781.502,00	119.211.176,00	69.570.326,00	58,36
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.681.270,00	185.459.624,00	(39.778.354,00)	(21,45)
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	5.990.000,00	3.500.000,00	2.490.000,00	71,14
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.986.000,00	4.000.000,00	(1.014.000,00)	(25,35)
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	49.450.500,00	(49.450.500,00)	(100,00)
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.461.500,00	22.840.000,00	(8.378.500,00)	(36,68)

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2024

10	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.719.752,29	0,00	7.719.752,29	100,00
11	Beban Natura dan Pakan-Natura	16.440.000,00	18.205.000,00	(1.765.000,00)	(9,70)
12	Beban Makanan dan Minuman Rapat	135.525.000,00	122.180.000,00	13.345.000,00	10,92
13	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.790.000,00	6.041.500,00	7.748.500,00	128,25
14	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	32.975.000,00	41.257.640,00	(8.282.640,00)	(20,08)
15	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	49.740.000,00	0,00	49.740.000,00	100,00
16	Beban Pakaian Batik Tradisional	44.200.000,00	24.750.000,00	19.450.000,00	78,59
JUMLAH		970.669.363,29	838.430.703,00	132.238.660,29	15,77

5.4.1.2.3 **Beban Jasa**

Beban Jasa tahun 2024 adalah sebesar Rp. 12.464.448.225,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 34.367.937,00 atau 0.28 % dari beban jasa tahun sebelumnya sebesar Rp 34.367.937,00 Rincian beban jasa per Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.2.3
Rincian Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023

No	Perangkat Daerah	Saldo per	Saldo per	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)		
1	Beban Jasa Kantor	9.366.388.985,00	9.048.031.534,00	318.357.451,00	3,52
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	1.370.239.320,00	1.336.145.104,00	34.094.216,00	2,55
3	Beban Sewa Tanah	1.001.295.600,00	0,00	1.001.295.600,00	100,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	442.030.000,00	195.000.000,00	247.030.000,00	126,68
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	168.375.000,00	324.995.000,00	-156.620.000,00	-48,19
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	116.119.320,00	246.741.900,00	-130.622.580,00	-52,94
	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	1.279.166.750,00	-1.279.166.750,00	-100,00
	Jumlah	12.464.448.225,00	12.430.080.288,00	34.367.937,00	0,28

5.4.1.2.4 **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan tahun 2024 adalah sebesar Rp 728.885.964,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 400.576.040,00 atau 122,01 % dari beban pemeliharaan tahun sebelumnya sebesar Rp 328.309.924,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.2.4
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per	Saldo per	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)		
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	293.009.648,00	168.132.624,00	124.877.024,00	74,27
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	289.300.816,00	160.177.300,00	129.123.516,00	80,61
	Jumlah	582.310.464,00	328.309.924,00	254.000.540,00	122,01

5.5.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.373.075.351,0 mengalami kenaikan sebesar Rp 125.709.431,00 atau 10,08% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.247.365.920,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5124
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per	Saldo per	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)		
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.364.836.351,00	1.206.782.920,00	158.053.431,00	13,10
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.239.000,00	40.583.000,00	-32.344.000,00	-79,70
	Jumlah	1.373.075.351,00	1.247.365.920,00	125.709.431,00	10,08

5.6.1.2.4 Beban Bunga

Beban Bunga Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 12.681.597.221,00 yang merupakan beban bunga atas pinjaman daerah ke Bank bjb. Beban Bunga tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 542.881.935,00 atau 4,47% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 12.138.715.286,00.

Tabel 5.6124
Rincian Beban Bunga Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bunga atas Pinjaman Daerah	12.681.597.221,00	12.138.715.286,00	542.881.935,00	4,47
	Jumlah	12.681.597.221,00	12.138.715.286,00	542.881.935,00	4,47

5.7.1.2.4 **Beban Hibah**

Beban Hibah Tahun 2024 adalah sebesar Rp 4.481.905.856,46 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.152.048.674,08 atau 92.37% dari beban hibah tahun sebelumnya sebesar Rp 2.329.857.182,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7124
Rincian Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per	Saldo per	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)		
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.481.905.856,46	0,00	4.449.876.824,46	100,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	2.329.857.182,38	- 2.329.857.182,38	-100,00
	Jumlah	4.481.905.856,46	2.329.857.182,38	2.152.048.674,08	92,37

5.8.1.2.5 **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 801.704.919,00 mengalami penurunan Rp.-804.401.738,00 atau -50.08% dari beban Tahun sebelumnya sebesar Rp.1.606.106.657,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.8.1.2.5
Rincian Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per	Saldo per	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)		
1	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.113.361,00	23.554.736,00	- 441.375,00	- 1,87
2	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	22.524.620,00	22.524.620,00	-	-
3	Beban Penyusutan Aset	-	12.135.560,00	- 12.135.560,00	- 100,00
	Jumlah	1.606.106.657,00	1.933.588.108,80	- 327.481.451,80	- 16,94

5.8.1.2.4 **Beban Transfer**

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 184.378.301.253,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 11.900.689.721,40 atau 6,90% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp 172,477.611.532,00 Beban Transfer terdiri atas Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9124
Rincian Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per	Saldo per	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)		
1	Beban Bagi Hasil	15.125.511.547,40	14.688.046.330,00	437.465.217,40	2,98
2	Beban Bantuan Keuangan	169.252.789.706,00	157.789.565.202,00	11.463.224.504,00	7,26
	Jumlah	184.378.301.253,40	172.477.611.532,00	11.900.689.721,40	6,90

5.8.1.2.5 **Beban Tak Terduga**

Beban tak terduga Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 828.485.166,00 mengalami penurunan Rp.-3.592.107.533,00 atau -81,26% dari beban Tahun sebelumnya sebesar Rp.4.420.592.699.

5.91.2.4.5 **SURPLUS DEFISIT LO**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 adalah sebesar Rp 967.597.681.769,85 mengalami kenaikan sebesar Rp 105.400.859.336,03 atau 12,22% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 862.196.822.433,82. Surplus/Defisit-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

1) Pendapatan – LO	1.190.046.373.919,00
2) Beban	228.359.791.603,15
Surplus/(Defisit)-LO	<u>961.686.582.315,85</u>

5.4. POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldi akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus/deficit dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi perubahan kebijakan / kesalahan mendasar. Laporan operasional pada laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara lapora oprasional (LO) Dengan neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang kurangnya pos pos berikut :

5.1.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal per 1 januari 2024 adalah sebesar (Rp25,085,187,128.48) merupakan ekuitas akhir per 3 1 desember 2024

5.1.2 Surplus/Defisit-LO

Penyajian nominal Surplus/Defisit-LO berasal dari laporan operasional yang merupakan penjumlahan selisih lebih antara Surplus/Defisit kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa yang menambah nilai ekuitas pada neraca.

Surlus/Defisit-LO Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 967.597.681.769,85 dengan perhitungan sebagai berikut

Pendapatan-LO	Rp 1.190.046.373.919,00
Beban -Lo	Rp 228.359.791.603,15
Surplus/Defisit-LO	Rp 961.686.582.315,85

5.1.3 RK PPKD

RK PPKD PER 31 Desember 2024 sebesar Rp (942.354.579.942,00) Merupakan bagian dari Ekuitas di Neraca. RK Mutasi Keluar Rp (51.522.806.027,00) merupakan Mutasi Kas BOS dan BOP ke disdik.

5.1.4 Dampak kumulatif-Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin

Nilai dampak komulatif akumulasi penyusutan peralatan dan mesin tahun 2024 (01 januari s.d 31 Desember 2024) adalah sebesar Rp. 2,291,583.00 diperoleh dari pengurangan penyusutan Pengurangan lainnya dari perubahan kode barang yang merubah masa manfaat sehingga ada selisih Rp.2.291.583,00 .berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

5.1.5 Koreksi kesalahan-Penambahan Aset Tanah

Koreksi penambahan aset tanah lainnya tahun 2024 (01 Januari s.d 31 Desember 2024) adalah sebesar Rp. 9,317,282,391.00terdiri dari :

NAMA BARANG	ALAMAT	LUAS	NILAI PEROLEHAN
Tanah bangunan pertokoan/rumah took/koperasi	Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya	9977 m2	Rp. 1.995.230.391
Tanah Kosong yang sudah diperuntukan	Desa Cintaratu Kecamatan Parigi	52.004 m2	Rp. 728.056.000
Tanah Kosong yang sudah diperuntukan	Desa Cintaratu Kecamatan Parigi	114.925 m2	Rp.1.608.950.000
Tanah lapang pacuan kuda	Desa Legokjawa Kecamatan Cimerak	95.900 m2	Rp. 4.123.200.000
Tanah lapang pacuan kuda	Desa Legokjawa Kecamatan Cimerak	14.462 m2	Rp. 694.176.000
Tanah lapang pacuan kuda	Desa Legokjawa Kecamatan Cimerak	1.968 m2	Rp. 94.464.000
Tanah untuk makam umum	Desa Cintaratu Kecamatan Parigi	5.229 m2	Rp.73.206.000
TOTAL			Rp. 9.317.282.391

5.1.5.1 Koreksi kesalahan-Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin

Koreksi kesalahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin tahun 2024 (01 Januari s.d 31 Desember 2024) adalah sebesar Rp. 32,029,032.00 terdiri dari 2 unit kendaraan roda empat yang di pinjam pakai oleh mako brimob yaitu kendaraan Toyota Rush 1,5 S A/T GR Sport sebanyak 2 unit.

5.1.5.2 Koreksi kesalahan- Pencatatan/Pengakuan utang

Koreksi Pencatatan/Pengakuan Utang tahun 2024 (01 Januari s.d 31 Desember 2024)
Adalah sebesar Rp.(22,924,931,00) terdiri dari

N0	URAIAN	NOMINAL
1	Penambahan Utang Bagi Hasil Retribusi ke Desa dan bagi hasil koperasi	Rp (22,924,931.,00)
JUMLAH		Rp (22,924,931.,00)

5.1.5.3 Koreksi Kesalahan - Cadangan Penyisihan Piutang TGR

Koreksi Kesalahan Cadangan Penyisihan Piutang TGR Tahun 2024 adalah sebesar Rp.1.569.000 dikarenakan adanya penurunan Beban Penyisihan TGR Tahun 2024.

5.1.5.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp.(48.281.101.972,63) didapatkan dari perhitungan berikut

Aset	Rp	95.819.845.386,08
Kewajiban	Rp.	143.757.409.052,71
Ekuitas akhir	Rp.	(47,937,563,666.63)



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Pangandaran merupakan Kabupaten hasil Pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis di Propinsi Jawa Barat yang baru ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan Undang undang Nomor 21 Tahun 2012. Kabupaten Pangandaran terletak di bagian selatan Propinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa tengah (Kabupaten Cilacap)

Kabupaten Pangandaran memiliki Ibukota Kabupaten di Kecamatan Parigi dengan Cakupan Wilayah terdiri atas 10 Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Parigi
- b. Kecamatan Cijulang
- c. Kecamatan Cimerak
- d. Kecamatan Cigugur
- e. Kecamatan Langkaplancar
- f. Kecamatan Mangunjaya
- g. Kecamatan Padaherang
- h. Kecamatan Kalipucang
- i. Kecamatan Pangandaran
- j. Kecamatan Sidamulih

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012, batas administrasi Wilayah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa, Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti ,Desa Patimuan, Desa Rawa apu , Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah

- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Samudra Hindia
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasanggrahan Kecamatan Cikatomas, Desa Neglasari , Desa Tawang, Desa Panca wangi, Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan perubahan Nomenklatur Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah , Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah di rubah menjadi Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Tugas , Fungsi Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran sebanyak 25 Orang . Dari jumlah tersebut adalah golongan IV sebanyak 5 orang, diikuti oleh golongan III sebanyak 18 orang, golongan II sebanyak 2 orang dan pegawai Non PNS/Magang/Sukwan 30 Orang

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah , terdiri dari :

- a. Kepala Badan membawahkan
 - 1. Jabatan fungsional
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 - 2. Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
- d. Bidang Akuntansi , membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan
 - 2. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja
- e. Bidang Aset, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Daerah
 - 2. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengamanan Aset Daerah
- f. Bidang Perbendaharaan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan
 - 2. Sub Bidang Kas Daerah
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Hal ini berpengaruh terhadap Belanja Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.

Data pegawai definitif di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Pangkat / Gol. Ruang
1	Drs.HENDAR SUHENDAR S, MM	KEPALA BADAN	Pembina Utama Muda, IV/c
2	IDI KURNIADI,S.IP,MM	SEKRETARIS BADAN	Pembina , IV/a
3	SOLIHUDIN ,S.Ag,M.Pd	KEPALA BIDANG ANGGARAN	Pembina , IV/a
4	ASEP JUANDI,SE,M.Si	KEPALA BIDANG AKUNTASI	Pembina, IV/a
5	NANIK WIDIANINGSIH,SE.M.Si	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	Pembina, IV/a
6	MIMIN MARLINA,S.IP	KEPALA BIDANG ASET	Penata Tk.I, III/d
7	Hj. ATIS DAHNIAR, A.Md	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	Penata Tk.I, III/d
8	TITING RUKAESIH,S.IP.MM	PERENCANA AHLI MUDA	Penata Tk 1,III/d
9	MEMET GANDA SASMITA,SE,MM	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Penata Tk 1,III/d
10	SUHERMAN, S.IP	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH	Penata, Tk 1 III/d
11	ASEP IRFANBAHTIAR ,SE	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH	Penata, III/c
12	YUDI SUPRIADI,S.IP	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	Penata Tk.I, III/d
13	YULI KUSMIATI, SE	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA	Penata III/c
14	IIS RISTIANI,SH	KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI DAN PENATAUSAHAAN ASET DAERAH	Penata III/c
15	IKA LUSIANA DARSONO, SE., MM	KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN	Penata Muda Tk.I/III b
16	ARI PRATAMA JANUANSYAH,SE	FUNGSIONAL UMUM	Penata Muda ,III/a
17	IQRO NUR HAKIM,S.Ak	FUNGSIONAL UMUM	Penata Muda ,III/a
18	DEDEN FITRI NURCAHYA	FUNGSIONAL UMUM	Penata Muda, Tk.I, III/b

19	AYU AISYAH AZZAHRA,S.Ak	FUNGSIONAL UMUM	Penata Muda ,III/a
20	FEBBY FEBRIANY,SE	FUNGSIONAL UMUM	Penata Muda ,III/a
21	DWI AHDINI FITRI	FUNGSIONAL UMUM	Pengatur Muda Tk.I, II/b
22	SANTI NURWANTI	FUNGSIONAL UMUM	Penata Muda ,III/a
23	ADANG HIDAYAT	FUNGSIONAL UMUM	Penata Muda ,III/a
24	ROBI MEGANTARA, SE	FUNGSIONAL UMUM	Penata Muda ,III/a
25	ARIANI WIDIASTUTI, S.IP	FUNGSIONAL UMUM	Penata Muda ,III/a

Selain pegawai definitif, di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) di bantu oleh 28 orang tenaga kontrak/magang yang telah bergabung dan membantu pelaksanaan tugas di Badan Keuangan dan Aset Daerah



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Catatan Atas Laporan Keuangan, disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran sehingga diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna laporan dan dapat dipahami oleh pembaca secara luas.

Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran.

Cijulang, 20 Mei 2025

Pt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pangandaran

